

## **Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh)**

**Faisal<sup>1</sup>, Ardian<sup>2</sup>, Sabarniati<sup>3</sup>, Cut Yunina Eriva<sup>4</sup>**

Akuntansi Sektor Publik<sup>1,2,3,4</sup>, Politeknik Aceh

[faisal@gmail.com](mailto:faisal@gmail.com)<sup>1</sup>, [ardian@politeknikaceh.ac.id](mailto:ardian@politeknikaceh.ac.id)<sup>2</sup>, [sabarniati@politeknikaceh.ac.id](mailto:sabarniati@politeknikaceh.ac.id)<sup>3</sup>,  
[cut.eva@politeknikaceh.ac.id](mailto:cut.eva@politeknikaceh.ac.id)<sup>4</sup>

### ***ABSTRAK***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 36 responden yang terdiri dari Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di kantor Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

*Kata Kunci: Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal dan Kinerja Instansi Pemerintah*

### **I. PENDAHULUAN**

Berbagai praktik buruk birokrasi, seperti ketidakpastian pelayanan, pungutan liar serta pengabaian hak dan martabat masyarakat, masih sangat mudah dijumpai di hampir setiap satuan birokrasi publik. Selain itu, sering juga dilihat dan didengar adanya tindakan dan perilaku birokrasi publik yang tidak sopan, tidak ramah, diskriminatif, sistem pelayanan yang belum transparan, berbelit-belit serta tidak menjamin adanya kepastian, baik waktu maupun biaya. Kondisi ini terjadi karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan sektor publik. Dalam hal pelayanan sektor publik, masyarakat membutuhkan transparansi, maka akuntansi sektor publik dapat dijadikan

standar dalam menyusun informasi mengenai kinerja lembaga publik, sehingga terjadi kesepakatan antara lembaga pemerintah (sebagai penyusun, pemeriksa, serta pengawas) dan masyarakat dalam memahami informasi tersebut.

Pengawasan Internal berarti pendayagunaan aparatur negara dalam memberantas adanya unsur kecurangan atau penyelewengan serta mengawasi kinerja pengelolaan pemerintah daerah sehingga tercipta *good governance*. Pengawasan internal dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dari kegiatan operasional, keandalan laporan keuangan disektor pemerintahan, serta ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengadakan suatu pengawasan internal untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengawasan internal di Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dilakukan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh yang merupakan aparat pengawasan internal pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Kota Banda Aceh. Fungsi dari Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga diharapkan dapat terciptanya *good governance* dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

*Good governance* dapat tercipta salah satunya melalui perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyelenggaraan SAKIP meliputi; rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revidu, dan evaluasi kinerja serta laporan pemerintah pusat. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi pemerintah di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktek *fraud* yang terjadi

di berbagai instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi ataupun lembaga terkait.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas serta fenomena yang ada, penulis mengangkat masalah mengenai akuntansi sektor publik, pengawasan internal serta kinerja instansi dengan judul “**Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh)**”.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh?

## **II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

### **Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Sektor publik secara sederhana dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya (Mardiasmo, 2012: 23). Akuntansi sektor publik adalah akuntansi untuk memeriksa dan mencatat hal-

hal yang berkaitan dengan keuangan atau kegiatan materiil seperti barang dan jasa yang dilakukan pemerintah (Halim, 2014: 18). Dalam artian luas akuntansi sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Bastian, 2014: 47).

Akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal Ratmono (2015: 32). Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi serta proses pencatatan peristiwa ekonomi dalam suatu organisasi yang sering dilakukan pada sektor publik baik itu di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Erlina, 2015: 47).

### **Pengertian Pengawasan Internal**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mendefinisikan bahwa, pengawasan internal merupakan seluruh proses kegiatan, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengawasan internal merupakan proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Kadarisman, 2013: 172).

Pengawasan internal merupakan tindakan untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi atau untuk menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal dimana aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi (Halim (2014: 70

### **Indikator Pengawasan Internal**

Indikator pengawasan internal yang dapat digunakan pimpinan organisasi, yaitu (Bastian, 2014: 49):

1. Organisasi (*organization*), organisasi sebagai sarana kontrol, merupakan struktur peran yang dituju untuk orang-orang di dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan ekonomis.
2. Kebijakan (*policy*), suatu kebijakan adalah pernyataan prinsip yang dibutuhkan, menjadi pedoman atau membatasi tindakan.
3. Prosedur (*procedure*), merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas sesuai kebijakan yang telah

ditetapkan.

4. Personalia (*personnel*), orang-orang yang Personalia diperkerjakan atau ditugaskan harus memiliki kualifikasi untuk melakukan tugas yang diberikan. Bentuk kontrol yang baik disamping kinerja masing-masing individu adalah *supervise*.
5. Akuntansi (*accounting*), merupakan sarana yang sangat penting untuk kontrol keuangan pada aktifitas dan sumber daya.
6. Penganggaran (*budgeting*), merupakan suatu pernyataan hasil-hasil yang diharapkan dinyatakan dalam bentuk numerik. Sebagai sebuah kontrol, anggaran menetapkan standar masukan sumber daya dan hal-hal yang harus dicapai sebagai keluaran.
7. Pelaporan, kebanyakan organisasi, manajemen berfungsi membuat keputusan berdasarkan laporan yang diterima. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna dan ekonomis.

### **Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah**

Istilah kinerja berasal dari *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) atau juga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2015: 67).

### **Indikator Kinerja Instansi Pemerintah**

Kinerja instansi pemerintah mendorong instansi fokus pada pencapaian sasaran (Mardiasmo, 2012: 51). Dalam upaya pencapaian sasaran perlu sebuah alat ukur yang dinamakan indikator kinerja. Adapun indikator kinerja pemerintah yaitu:

1. Ketaatan, berkaitan dengan upaya audit dengan mempertanyakan sejauh mana transaksi oleh pemerintah telah sejalan atau sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan.
2. Efisiensi, berkaitan dengan sejauh mana instansi pemerintah telah mencapai tingkat produktifitas optimum atas dasar sumber daya yang telah digunakan;
3. Efektivitas, berkaitan dengan sejauh mana tingkat pencapaian tujuan kebijakan atas dasar pemanfaatan sumber daya publik.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Dan Sumber Data**

Penelitian ini dilakukan di kantor Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, yang beralamat di Jalan Tengku Abu Lam U No.7 Gampong Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik (Sugiyono, 2018: 45). Menurut Hajar (2011: 76) menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang mana hasil penelitiannya disajikan dalam bentuk deskriptif yang menggunakan angka statistik.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner, kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada pegawai (responden) di seluruh organisasi pemerintahan (Hartono,

2017: 82). Responden diminta untuk melengkapi kuesioner dengan model *skala likert* untuk menunjukkan persetujuannya terhadap serangkaian pernyataan dengan skor yang dapat dilihat pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Skala Likert**

Pernyataan Positif		Pernyataan Negatif	
Sangat Setuju (SS)	5	Sangat Setuju (SS)	1
Setuju (S)	4	Setuju (S)	2
Kurang Setuju (KS)	3	Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2	Tidak Setuju (TS)	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	Sangat Tidak Setuju (STS)	5

Sumber : Hartono, 2017

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini jumlah responden yang menjadi sampel penelitian adalah 36 pegawai Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, identitas diri yang ditanyakan adalah jenis kelamin, usia, pendidikan dan lama kerja.

##### Uji Validitas

Kriteria yang digunakan untuk menafsirkan hasil uji validitas, yaitu:

1. Jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka item kuisisioner dinyatakan valid dan dapat dipergunakan
2. Jika nilai  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka item kuisisioner dinyatakan tidak valid dan tidak dapat dipergunakan.

Nilai  $r_{tabel}$  dapat dilihat pada tabel r dengan signifikansi 0,05 (uji dua arah) dan nilai  $df = N - 2$ , karena responden pada penelitian ini berjumlah 36 orang, maka  $df = 36 - 2 = 34$ , didapat nilai  $r_{tabel}$  adalah 0,3291. Hasil uji validitas variabel penerapan akuntansi sektor publik dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Validitas**

Penerapan Akuntansi Sektor Publik			
Butir item	r-hitung	r-tabel	Status
1	0,642	0,3291	Valid
2	0,633	0,3291	Valid
3	0,594	0,3291	Valid
4	0,786	0,3291	Valid
5	0,622	0,3291	Valid
6	0,652	0,3291	Valid
7	0,645	0,3291	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Validitas Pengawasan Internal**

Butir item	r-hitung	r-tabel	Status
1	0,540	0,3291	Valid
2	0,526	0,3291	Valid
3	0,655	0,3291	Valid
4	0,601	0,3291	Valid
5	0,761	0,3291	Valid
6	0,683	0,3291	Valid
7	0,647	0,3291	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Validitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Butir item	r-hitung	r-tabel	Status
1	0,602	0,3291	Valid
2	0,621	0,3291	Valid
3	0,660	0,3291	Valid
4	0,688	0,3291	Valid
5	0,727	0,3291	Valid

6	0,637	0,3291	Valid
7	0,665	0,3291	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

### Uji Reliabilitas

Kriteria Uji reliabilitas adalah nilai koefisien reliabilitas (*Cronbach Alpha*) lebih dari 0,6 maka kesimpulannya instrumen yang diuji tersebut adalah *real* (terpercaya). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.4

**Tabel 4.4**

#### Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Instrumen Variabel	Nilai reliabilitas	Status
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	0,755	Reliabel
Pengawasan Internal	0,745	Reliabel
Kinerja Instansi Pemerintah	0,772	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2022

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel akuntansi sektor publik dan variabel pengawasan internal terhadap variabel kinerja instansi pemerintah. Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5**

#### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	<b>6,593</b>	2,88		2,289	0,039
1 Penerapan Akuntansi Sektor Publik	<b>0,541</b>	0,134	0,619	4,025	0,001

Pengawasan Internal	<b>0,26</b>	0,161	0,249	3,621	0,004
---------------------	-------------	-------	-------	-------	-------

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 6,593 + 0,541X_1 + 0,260X_2 + e$$

Model persamaan diatas dibaca:

- Nilai konstanta sebesar 6,953 menunjukan variabel independen yaitu penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal dalam keadaan konstan tidak mengalami perubahan (sama dengan 0) maka akan menaikkan kinerja instansi senilai 6,953%
- Nilai koefisien regresi  $X_1$  adalah sebesar 0,541 menunjukkan bahwa jika akuntansi sektor publik mengalami kenaikan 1% maka akan menaikkan kinerja instansi pemerintah sebesar 5,41%.
- Nilai koefisien regresi  $X_2$  adalah sebesar 0.260 menunjukkan bahwa jika pengawasan internal mengalami kenaikan 1% maka akan menaikkan kinerja instansi pemerintah sebesar 2,60%.

#### Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji secara parsial atau uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (sendiri-sendiri), kriteria dari pengujian parsial bisa adalah sebagai berikut:

- Jika nilai Sig. < 0,05 atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka terdapat pengaruh variabel X terhadap

variabel Y.

2. Jika nilai Sig. > 0,05 atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh variabel penerapan akuntansi sektor publik terhadap variabel kinerja instansi pemerintah sebesar  $0,001 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $4,025 > t_{tabel} 2,034$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima yang berarti terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

## **Pembahasan**

Dari hasil penelitian terlihat bahwa semua variabel bebas (penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (kinerja instansi pemerintah), lebih rinci hasil analisis dan pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,025 atau lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  2,034 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak yang berarti terdapat pengaruh antara penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Berdasarkan dasar teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat penerapan standar

akuntansi sektor publik maka semakin meningkat kinerja instansi pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

### **Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 atau lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,621 atau lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  2,034 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak yang berarti terdapat pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyebutkan bahwa pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengawasan Internal merupakan pendayagunaan aparatur negara dalam memberantas adanya unsur kecurangan atau penyelewengan dengan diadakannya pengawasan internal dalam rangka mengawasi kinerja pengelolaan

pemerintah daerah sehingga tercipta *good governance* (Kadarisman, 2013: 173).

Berdasarkan dasar teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa apabila pengawasan internal dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada maka berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

### **Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 35,396 atau lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  3,276, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak yang berarti terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal secara simultan terhadap kinerja instansi pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai  $R Square$  sebesar 0,682, hal ini berarti bahwa pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 68,2% sedangkan sisanya 31,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap

kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Pengawasan internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel yang lebih banyak dan bisa menggambarkan kinerja instansi pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang sebenarnya.

2. Bagi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh agar tetap mempertahankan dan juga bisa lebih meningkatkan kinerjanya, karena kinerja yang baik menjadi faktor utama untuk mewujudkan *good governance*.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Biduri, Sarwenda. 2018. *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Dharmawan, Taufan. 2016. *Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung)*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4 (1), 2016, 9141-948
- Erlina. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fildzah, Ikrami. 2021. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hadjar, Ibnu. 2011. *Dasar-Dasar Metodologi penelitian Kuantitatif dalam pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Halim, Abdul 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, Ponjaya Tri. 2015. *pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi empiris bpkad kabupaten kubu raya tahun 2015)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
- Hartono, Jogiyanto. 2017. *Metodelogi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Haryanto. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Intan, Haska Wina Permata. 2015. *Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi Kasus Dispenda Prov , Dispenda Kota , Dan Dishub Prov )*. x, 1–15.
- Juliandi, Azuar. 2015. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi. Edisi Pertama*. Medan: Media Inn
- Kadarisman, Muhammad. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta Rajawali Pers
- Mangkunegara, Anwar P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muhidin, Ali. 2017. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Sujarweni, V. Wiratna. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukanto, Reksohadiprodjo. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Sutrisno, Edy. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara